

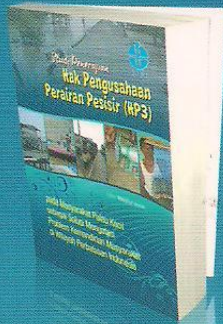


Studi Penerapan
**Hak Pengusahaan
Perairan Pesisir (HP3)**



Editor: Masyhuri Imron

**pada Masyarakat Pulau Kecil
sebagai Solusi Mengatasi
Problem Kemandirian Masyarakat
di Wilayah Perbatasan Indonesia**



Studi Penerapan
**Hak Pengusahaan
Perairan Pesisir (HP3)**

pada Masyarakat Pulau Kecil sebagai Solusi Mengatasi
Problem Kemandirian Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia

Pengelolaan perairan di Pulau Sebatik saat ini masih bertumpu pada kebijakan pengelolaan pemerintah pusat, melalui berbagai peraturan perundangan yang terkait. Berdasarkan perundang-undangan itu maka banyak lembaga pemerintah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir di Pulau Sebatik. Selain pemerintah, *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan kelautan di sekitar Pulau Sebatik adalah masyarakat lokal, yaitu berupa pemanfaatan laut untuk melakukan penangkapan ikan.

Banyaknya *stakeholder* di Sebatik menimbulkan terjadinya konflik antar *stakeholder*, yaitu konflik antara nelayan lokal dengan *trawl* dan konflik yang terjadi karena penanaman rumput laut. Konflik lain lebih bersifat politis, yaitu konflik Blok Ambalat, yang diklaim pemilikannya oleh pemerintah Malaysia. Banyaknya *stakeholder* yang terkait dengan pengelolaan laut diharapkan saling bersinergi, sehingga pengelolaan pesisir dan laut dapat dilaksanakan dengan optimal. Meskipun demikian, hal itu sulit dilakukan, karena masing-masing lembaga memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) diterapkan di kawasan ini, maka terjadinya benturan kepentingan antara berbagai lembaga tidak dapat dihindarkan.

LIPI Press

ISBN 978-979-799-484-6



9 789797 994846

Studi Penerapan
**Hak Pengusahaan
Perairan Pesisir (HP3)**

**pada Masyarakat Pulau Kecil
sebagai Solusi Mengatasi
Problem Kemandirian Masyarakat
di Wilayah Perbatasan Indonesia**

Oleh :
**Masyhuri Imron
Ary Wahyono
Akhmad Solihin**

Editor :
Masyhuri Imron

Jakarta, Desember 2009

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan - LIPI

Ttd

Drs. Abdul Rahman Patji, MA



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Kita Perkuat dan Bangun Bersama | 1

©2009 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan

Studi Penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3): pada Masyarakat Pulau Kecil sebagai Solusi Mengatasi Problem Kemandirian Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia/Masyhuri Imron, Ary Wahyono, Akhmad Solihin, Jakarta: LIPI Press, 2009

xi + 163 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN: 978-979-799-484-6

1. Hak Usaha - Pesisir

346.046

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi



*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232



KATA PENGANTAR

Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau, baik besar maupun kecil. Di antara pulau-pulau itu, sekitar 92 pulau berada di wilayah perbatasan, dan memiliki fungsi strategis bagi negara Indonesia, karena berkaitan dengan batas wilayah dengan negara tetangga, yaitu sebagai titik dasar dari garis pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia. Oleh karena itu pulau-pulau kecil di perbatasan itu perlu dikelola secara khusus dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya yang ada di dalamnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Buku yang merupakan hasil penelitian dengan judul “Studi Penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada Masyarakat Pulau Kecil sebagai Solusi Mengatasi Problem Kemandirian Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia”, ini merupakan hasil karya tim peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dengan kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengelolaan kelautan dan pulau kecil di masa yang akan datang.

Kepada para penulis, kami mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Kepada pihak-pihak yang telah membantu bagi terwujudnya tulisan ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ucapan syukur juga sudah selayaknya kami panjatkan dihadapan Allah, atas selesainya penelitian ini.

Jakarta, Desember 2009

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
kebudayaan – LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rahman Patji, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PENGANTAR PENULIS	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan dan Sasaran	8
1.4 Kerangka Pemikiran.....	8
1.5 Ruang Lingkup	12
1.6 Metodologi.....	12
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	17
2.1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan.....	17
2.1.1 Sejarah Kabupaten Nunukan.....	17
2.1.2 Kondisi Wilayah Kabupaten Nunukan	18
2.2 Kondisi Umum Daerah Sebatik	27
2.2.1 Kondisi Geografis	27
2.2.2 Penduduk dan Ketergantungan Penduduk pada Laut.....	37
2.2.3 Sarana dan Prasarana Umum	45
BAB III LANDASAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN KELAUTAN	51
3.1 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria	51

3.2	UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Pertambangan	53
3.3	UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia	55
3.4	UU No. 17 Tahun 1985 Tentang pengesahan UNCLOS	56
3.5.	UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	57
3.6	UU No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan ...	58
3.7	UU No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Tentang Keanekaragaman Hayati.....	59
3.8	UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.....	61
3.9	UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	64
3.10	UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	69
3.11	UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	70
3.12	UU No. 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.....	73
3.13	UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.....	73
3.14	UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.....	78
3.15	UUNo. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.....	79
3.16	UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.....	81
 BAB IV KELEMBAGAAN DAN ANALISA KONFLIK PERUNDANGAN		
		85
4.1	Kelembagaan	85
4.2.	Analisa Konflik Peraturan Perundang-Undangan dan Kelembagaan	88

	4.2.1 Pengaturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)	88
	4.2.2 Pengaturan Pukat Hela	104
BAB V	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KELAUTAN	113
	5.1 Masyarakat Lokal	113
	5.2 LSM dan Organisasi kenelayanan	129
	5.3 Pengusaha Perikanan	132
	5.4 Konservasi Mangrove	137
	5.5 Konflik antar <i>Stakeholder</i> dalam Pengelolaan	140
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	151
DAFTAR PUSTAKA		161
	di Kecamatan Sebatik	32
	di Kecamatan Sebatik	33
	di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat	35
	di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat	36
	40
	Sebatik 2007	41
	2007	43
	2007	44
	dan Kecamatan Sebatik Barat	48